

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Demokratik Kongo merupakan sebuah Negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah, Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan di Utara, Uganda, Rwanda, Burundi dan juga Tanzania yang terpisahkan oleh danau Kivudi Timur, Republik Kongo di Barat, Zambia dan Angola di Selatan¹. Masyarakat dari Republik Demokratik Kongo (RDK), terdiri dari berbagai suku. Hal ini dikarenakan terjadinya migrasi besar-besaran pada 2000 SM sampai tahun 500 oleh masyarakat Bantu yang berada di barat laut dan utara dari wilayah RDK. Masyarakat Bantu tersebut melakukan migrasi ke daerah RDK, khususnya ke daerah yang berada di dekat sungai Kongo. Dari sinilah bermula suatu kerajaan yang berdiri di wilayah RDK.

Pada awal tahun 1870, masuklah bangsa Eropa ke wilayah RDK, sebuah tim eksplorasi yang dipimpin oleh Sir Henry Morton Stanley, yang di biayai oleh Raja Leopold dari Belgia. Leopold menjadikan RDK sebagai salah satu koloninya di Afrika². Leopold akhirnya mendapatkan hak penuh atas RDK pada saat Konferensi Berlin pada tahun 1885. Dia menjadikan RDK sebagai property pribadinya dan menamainya sebagai Negara Bebas Kongo (*The Congo Free State*). Pada tahun 1908 parlemen Belgia menjadikan *The Congo Free State* menjadi *Belgian Congo* setelah mengambil hak kekuasaannya dari raja Belgia.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo, diakses tanggal 9 Februari 2009.

² Ibid.

RDK memperoleh kemerdekaannya pada 30 Juni 1960 dari pemerintah Belgia. Pada pemilihan umum parlemen, partai *Mouvement National Congolais*(MNC), yang dipimpin oleh Patrice Lumumba, memenangkan parlemen tersebut, dan menjadikannya Perdana Menteri. Sedangkan Joseph Kasavubu dari partai *Alliance des Bakongo* (ABAKO) terpilih sebagai Presiden. Setelah memperoleh kemerdekaannya *Belgian Congo* merubah nama menjadi Republik Kongo.

Pada 5 September 1960, terjadilah perselisihan antara Kasavubu dan Lumumba, antara Presiden dan Perdana Menteri, yang menyebabkan terjadinya krisis nasional di Republik Kongo. Joseph Mobutu yang merupakan kepala staff dari angkatan bersenjata Kongo (*Armee Nationale Congolaise* (ANC)), memanfaatkan situasi tersebut. Dia mulai mencari dukungan dari pihak militer untuk dapat merebut kekuasaan.

Akhirnya pada tahun 1965, Joseph Mobutu berhasil meng-kudeta pemerintahan yang dijalankan oleh Kasavubu. Joseph Mobutu mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, karena dia menyatakan menentang pemerintahan komunis dan menolak ideology itu untuk dapat masuk ke dalam wilayah Afrika. Oleh karena itu dia mendapatkan dukungan dari Dunia Barat. Setelah memenangkan kudeta tersebut Mobutu segera membentuk sistem satu partai di Republik Kongo dan dia sebagai Presidennya. Pada tahun 1966, Mobutu mengganti nama Negaranya menjadi Republik Demokratik Kongo, agar dapat di bedakan dengan Republik Kongo yang berada di wilayah Barat. Lalu pada tahun 1971, Mobutu kembali mengganti nama negaranya menjadi Zaire.

Presiden Mobutu sering digambarkan sebagai salah satu orang kuat Afrika, yang paling lama berkuasa. Sudah 32 tahun ia berkuasa. Sejak mengambil alih kekuasaan tahun 1965, Mobutu dengan dukungan militer dan rekan-rekannya cenderung memerintah dengan tangan besi. Mobutu yang merebut kekuasaan dengan dukungan AS di masa Perang Dingin untuk mencegah penyebaran komunisme di Afrika, dikenal sebagai pemimpin yang cerdas mengelola kekuasaannya. Atas nama bahaya ancaman komunisme, Presiden Mobutu menekan para lawan-lawan politik, memasung aktivis demokrasi dan melanggar hak asasi.

Istilah rezim memiliki pengertian sebuah sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan. Ia merupakan seksi kritis dalam sistem kekuasaan yang berlaku. Tapi secara prinsip, mereka mempertahankan sistem kekuasaan tersebut dan menolak sistem baru. Rezim Mobutu memiliki ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang buruk, yang ditandai dengan pembungkaman demokrasi. Ia menjalankan pemerintahan yang otoriter serta tidak segan menggunakan cara-cara yang kejam untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Selama pemerintahannya, Zaire menjadi *bandit state* karena Mobutu sibuk menimbun kekayaan padahal ekonomi negaranya kolaps. Rezim Mobutu memperlihatkan sebuah bentuk kleptokrasi yang luar biasa.³

³“Profil Negara-negara Afrika”, <http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id>, diakses tanggal 30 Januari 2009

Mobutu menasionalisasi semua perusahaan Eropa yang ada dinegaranya. Selebihnya ia mengusir semua jenis usaha yang dibangun oleh orang-orang Eropa. Langkah seperti ini tidak disadarinya bisa menyebabkan ekonomi Zaire turun drastis dan terseok-seok. Maka dari itu pada tahun 1977 ia ditekan untuk mengembalikan perusahaan-perusahaan Eropa berbisnis di Zaire. Sadar nyaris lumpuh, ia kemudian meminta bantuan Belgia untuk memerangi pemberontak di Provinsi Katanga. Beruntung, Mobutu masih bisa mempertahankan posisinya. Ia terpilih lagi menjadi presiden Republik Zaire.⁴

Gerakan massa di Kongo tahun 1990 mulai mencapai tahap yang sangat maju. Mobutu menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol desakan rakyat atas penggulingan kekuasaannya. Maka Mobutu memberi ruang bagi dua partai oposisi untuk hidup. Akan tetapi massa-rakyat menghendaki sistem multi-partai. Oposisi yang makin kuat dan ekonomi Zaire yang makin merosot menyebabkan Mobutu harus bersikap lebih hati-hati. Menyusul kerusuhan yang belakangan semakin marak terjadi, Zaire mencoba menegakkan pemerintahan multipartai. Kondisi perekonomian yanganjlok setelah penghentian bantuan dari IMF, Belgia dan Perancis, Mobutu akhirnya bersedia menegakkan pemerintahan multipartai. Menjelang akhir tahun 1991, untuk pertama kalinya selama 26 tahun berkuasa, Mobutu berbicara tentang demokrasi. Ia bersedia mengganti sistem pemerintahan partai tunggal dengan sistem multipartai. Inilah salah satu cara Mobutu mencoba

⁴"Mobutu Sese Seko", http://id.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko, diakses tanggal 9 Februari 2009.

meredam suasana dan menyelamatkan kekuasaannya. Tampaknya, Mobutu menduga ada kaitan antara kerusuhan dan oposisi.⁵

Inilah pilihan bagi negeri yang terlalu lama diperintah oleh seorang penguasa yang otoriter, apakah Presiden Mobutu bersedia mempraktekkan pemerintahan multipartai atau Zaire akan terus berada dalam kekacauan. Mobutu Sese Seko diharapkan tak lagi mencampuri urusan pemerintahan yang dijalankan oleh perdana menteri. Sebelumnya, Etienne Tshikedi, pemimpin Partai Serikat Demokrasi Sosial Progresif, partai oposisi pertama di Zaire, ditunjuk sebagai perdana menteri baru. Namun, upaya Tshikedi membentuk kabinet tak kunjung berhasil. Mobutu selalu mau campur tangan. Beberapa hari kemudian kembali meledak kerusuhan. Sesudah itu, Mobutu mulai lebih kompromistis. Dalam perundingan awal, ia berjanji menyerahkan beberapa posisi penting dalam kabinet pada oposisi. Namun, esoknya, Mobutu bersama Gerakan Revolusioner Populer, partainya yang berkuasa sekarang, meminta separuh dari 22 kursi menteri kabinet baru. Tentu saja Tshikedi, 58 tahun, yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ia bukan sekadar perdana menteri boneka, menolak.

Akhirnya Mobutu pun terpaksa memenuhi tuntutan rakyat dengan membentuk "*Soverign National Conference*", semacam Kongres Rakyat. Akan tetapi masih tetap banyak kekangan-kekangan terhadap Kongres Rakyat ini.⁶ Pada bulan Agustus 1992, "*Soverign National Conference*" memilih Etienne Tshisekedi sebagai Perdana Menteri yang baru. Tshisekedi adalah

⁵"Jatuhkan mobutu", <http://majalah.tempointeraktif.com/>, diakses tanggal 9 Februari 2009.

⁶"Radikalism vs Militerism", www.apakabar.net, diakses tanggal 9 Februari 2009.

tokoh oposisi pada masa itu yang sempat menjadi simbol perlawanan. Akan tetapi setelah berkuasa, Tshisekedi masih tetap mengakui keberadaan Mobutu dan mendukung sistem lama. Bahkan faksi radikal kelompok Tshisekedi pun berubah menjadi moderat. Sementara itu rakyat sudah menginginkan agar Mobutu segera disingkirkan dan diseret ke pengadilan. Sampai pada titik ini, masih sulit bagi rakyat untuk menggulingkan Mobutu. Karena Tshisekedi yang dulunya pro-rakyat sudah jadi anti-rakyat. Tipuan "demokratisasi" di tahun 1992 telah membawa gerakan rakyat di Kongo-Zaire pada sebuah tahap baru. Ini bukan membuat gerakan massa kendor. Mereka justru meningkatkan kualitas perlawanan untuk menghancurkan rejim Mobutu secara total. Ketika Mobutu tetap melanjutkan pemerintahannya dengan tangan besi, maka pertentangan antara rakyat dengan pemerintah semakin tajam.

Berangkat dari sinilah, Kabila dan kekuatan oposisi lainnya berhasil memainkan peranan penting. Salah satu kelompok oposisi yang masih tetap konsisten dengan garis perjuangan mereka pada saat itu adalah *Patriotic Front (Front Patriot)*, sebuah kekuatan radikal dibawah pimpinan Jean Baptiste Sondji. Patriotic Front mempunyai sikap untuk tidak bergabung bersama pemerintahan Tshisekedi dan Mobutu harus turun tanpa syarat dan diseret ke pengadilan. Kesuksesan Kabila dan kelompok oposisi lainnya terletak pada kemampuan mereka untuk menyatukan aspirasi rakyat. Yaitu tuntutan akan sebuah kehidupan yang lebih baik, dalam kebebasan dan demokrasi. Tuntutan itu mendapat perhatian dari rakyat awam sekalipun. Program yang diajukan adalah pendidikan bagi semua orang, lapangan kerja

bagi semua orang, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak. Dan, sistem lama terguling secara total.

Akhirnya Joseph Kabila terpilih sebagai presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) pada bulan Agustus 1998, dan ini merupakan simbol kemenangan rakyat bagi Negara yang terletak di Afrika Bagian tengah ini untuk menggulingkan dan mengakhiri kediktatoran seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 32 tahun, semasa masih bernama Zaire, negara ini berada dalam cengkeraman kekuasaan rezim otoriter dibawah kepemimpinan Presiden Mobutu (1965 – 1997). Mobutu dikenal sebagai pemimpin diktator di Zaire, negara yang kini berubah nama menjadi Republik Demokratik (RD) Kongo.

Namun, tidak lama berselang setelah terpilihnya Kabila sebagai Presiden RDK, terjadilah pemberontakanyang berupaya mendongkel Kabila. Dalam peristiwa ini, Uganda ikut meramaikan pergolakan di Kongo, dengan berdiri di belakang para penentang Kabila. Aksi kekerasan tersebut telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian di Kongo hingga memaksa PBB melakukan intervensi dan berakhir ketika Presiden Joseph Kabila menyelenggarakan Pemilihan Umum demokratis pertama sejak RDK merdeka pada 30 Juli 2006.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“ Bagaimana Transisi Demokrasi di Republik Demokratik Kongo pasca keruntuhan rezim Mobutu ?”

C. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

1. Teori Legitimasi

Legitimasi menurut Lucian W. Pye adalah “suatu yang melibatkan kemampuan suatu sistem dan sentimen masyarakat terhadap otoritas pemerintahan”.

Pengertian lain tentang legitimasi adalah pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa atau dapat juga dikatakan :

1. Hak untuk berkuasa sehingga ditaati oleh rakyatnya
2. Pengakuan kekuasaan penguasa oleh rakyat yang ditunjukkan dengan ketaatan
3. Keabsahan kekuasaan penguasa untuk memimpin dan mengatur atau mengontrol rakyat dan rakyat mengakui keabsahan tersebut.

Di Republik Demokratik Kongo, setelah runtuhnya rezim pemerintahan Mobutu, rakyat mengakui terhadap pemerintahan baru yang terbentuk. Karena otorisasi pemerintahan baru tersebut terbentuk berdasarkan dari aspirasi rakyat sendiri yang diwakili oleh wakil-wakilnya didalam pemerintahan.

2. Teori Transisi Demokrasi

Di dalam teori transisi, Huntington⁷ menyebutkan bahwa terjadinya demokrasi dari rezim non demokratis dapat melalui 4 proses “

⁷ Samuel P. Huntington, “Gelombang Demokratisasi Ketiga”, Jakarta, Grafiti Press, 2000

- a. Transformasi atau reforma, dimana elit penguasa mengambil upaya memimpin demokrasi
- b. Replacement atau Ruptura, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi
- c. Transplacement atau Ruptforma, dimana demokrasi terjadi akibat negosiasi antara pemerintah dengan kelompok posisi
- d. Intervensi, hal ini jarang terjadi dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakannya dari luar.

Dari empat proses diatas, transisi demokrasi di Republik Demokratik Kongo termasuk dalam mode Replacement atau Ruptfora dimana kelompok oposisi utama yaitu Patriotic Front (Front Patriot) yang memberontak terhadap rezim Mobutu, memimpin perjuangan menuju sebuah negara yang demokrasi. Perjuangan kelompok oposisi ini berhasil meruntuhkan rezim Mobutu tersebut.

Dan menurut Gulermo O. Donnel, sebuah proses transisimenuju demokrasi ini dibutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi yaitu⁸ :

1. Keberhasilan *recorvery economy*
2. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan yang baru lewat pemilu
3. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan dari kelas menengah dan masyarakat sipil

⁸O'Donnel, Guillermo dan Philipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan ketidakpastian*, PT. Pustaka LP3S

4. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan.

Dilihat dari proses transisi demokrasi menurut Gulermo O. Donnel, maka perubahan demokrasi yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo masih banyak mengalami hambatan.

D. Hipotesa

Dari Latar belakang masalah dan teori yang telah dijelaskan, maka didapat perubahan demokrasi yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo pasca runtuhnya rezim Mobutu masih mengalami hambatan. Pemerintah pasca rezim Mobutu masih mempunyai beberapa hal yang sangat mempengaruhi perubahan demokrasi tersebut.

E. Metodologi penulisan dan pengumpulan data

Dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali ditemukan kesulitan dalam teknik meneliti permasalahan internasional yang dikarenakan adanya jarak, kompleksitas masalah, dan lain-lain. Sehingga penulisan ini bersifat anobservasi research dan bersifat deskriptif.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, jurna-

jurnal di internet dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan penyebab-penyebab tidak berjalannya demokrasi di Republik Demokratik Kongo paska rezim Mobutu, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai pada saat jatuhnya rezim Mobutu di tahun 1998 sampai setelah dilakukannya Pemilu yang pertama kali setelah Republik Demokratik Kongo merdeka tahun 2006.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam karya tulis ini penulis membagi kedalam Lima Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang memuat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan gambaran umum tentang Republik Demokratik Kongo, mulai dari sejarahnya, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan politik termasuk kondisi pemerintahan yang terjadi pada rezim Mobutu.

Bab ketiga, mengemukakan runtuhnya rezim Mobutu dan perubahan demokrasi yang terjadi di Republik Demokratik Kongo.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap transisi demokrasi yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan hambatan-hambatannya.

Bab kelima, merupakan Bab akhir yang menutup karya tulis ini, yang berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.